



Judul : Anggota Banggar DPR Tersangka Suap DAK
Tanggal : Jumat, 08 Februari 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Anggota Banggar DPR Tersangka Suap DAK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi XI DPR yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) Sukiman sebagai tersangka penerima suap Rp2,65 miliar dan USD22.000.

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, sejak Oktober 2018 KPK telah membuka penyelidikan baru atas kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN/APBN Perubahan sejumlah daerah. Dari hasil penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara.

Dari gelar perkara telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas adanya tindak pidana korupsi dalam delik suap-menuyauap sehubungan dengan pengurusan dan pengaturan alokasi anggaran DAK dari APBN Perubahan 2017 dan dari APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua.

Karenanya KPK memutuskan menaikkan penyelidikan kasus ini ke penyidikan. Bersa-

maan dengan itu KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR yang juga anggota Banggar dari Fraksi PAN Sukiman sebagai tersangka penerima suap serta Pelaksana Tugas dan Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak Natan Pasomba sebagai tersangka pemberi suap.

“NPA (Natan Pasomba) diduga memberi uang Rp4,41 miliar yang terdiri dalam bentuk rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan USD33.500. Dari sejumlah uang tersebut SKM (Sukiman) diduga menerima Rp2,65 miliar dan USD22.000,” ujar Saut saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam.

Mantan staf ahli kepala BIN itu mengungkapkan, uang yang diberikan Natan merupakan hasil *commitmen* *fee* sebesar

9% dari dana perimbangan berupa DAK dan DID yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Adapun Sukiman diduga menerima uang suap secara bertahap dalam kurun Juli 2017 hingga April 2018. “Penerimaan SKM melalui beberapa pihak sebagai perantara,” tegasnya.

Saut membeberkan, mulanya Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas PU mengajukan DAK untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat proses pengajuan, Natan bersama pihak rekanan atau pengusaha melakukan pertemuan dengan pegawai Kemenkeu untuk meminta bantuan. Pegawai Kemenkeu tersebut kemudian meminta bantuan Sukiman. Akhirnya terjadi kesepakatan *fee* suap untuk pengurusan dan alokasi anggaran DAK/Dana Alokasi Umum (DAU)/DID untuk Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2017-2018.

“Dari pengaturan tersebut akhirnya Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi DAK pada APBN Perubahan 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan menda-



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

NPA (Natan Pasomba) diduga memberi uang Rp4,41 miliar yang terdiri dalam bentuk rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan USD33.500. Dari sejumlah uang tersebut SKM (Sukiman) diduga menerima Rp2,65 miliar dan USD22.000.

THONY SAUT
SITUMORANG
Wakil Ketua KPK

patkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar,” tegasnya.

Dia melanjutkan, untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi. Masing-masing rumah rekanan atau pengusaha di Jakarta dan Manokwari serta rumah mantan pejabat Dinas Pemkab Pegunungan Arfak yang ada Makassar. Dari penggeledahan

tersebut, tim menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Saut menegaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap DAK dan DID tiga terdakwa yang sudah divonis yang sebelum ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Mei 2018. Pertama, terdakwa penerima suap total Rp3,3 miliar Amin Santono (divonis 8 tahun penjara disertai pencabutan hak politik selama 3 tahun) selaku anggota Komisi XI dan Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Kedua, terdakwa penerima suap Rp465 juta konsultan Eka Kamaluddin (divonis 4 tahun).

Ketiga, terdakwa penerima suap Rp300 juta serta gratifikasi Rp6.528.985.000, USD55.000, dan 325.000 dolar Singapura (sekitar Rp3.568.825.000) Yaya Purnomo (divonis 6 tahun 6 bulan penjara) selaku kepala seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu. “KPK tetap berkomitmen untuk terus menelusuri arus uang dan pelaku lain yang juga harus bertanggung jawab secara hukum berdasarkan bukti

yang cukup,” ujarnya.

Dia memaparkan, sehubungan dengan ini pula KPK perlu menyampaikan dan menegaskan bahwa KPK telah dan terus melakukan pencegahan dan penindakan korupsi di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat. Langkah ini adalah bagian dari upaya KPK mendukung pembangunan di Papua dan Papua Barat agar pembangunan tersebut dimikmati oleh masyarakat setempat. Pasalnya korupsi yang terjadi sangat merugikan masyarakat setempat dan hanya menguntungkan segelintir orang baik pejabat di pusat, pejabat di daerah maupun pihak swasta yang melakukan korupsi secara bersama-sama.

“Sekali lagi KPK mengingatkan, kepada seluruh penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah, termasuk kawasan Papua dan Papua Barat, agar melakukan pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab dan hati-hati. Karena uang yang dikelola tersebut adalah hak masyarakat sehingga korupsi yang dilakukan sama artinya merampas hak masyarakat untuk menik-

mati anggaran dan pembangunan yang ada,” ucap Saut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, di tahap penyelidikan sebelumnya ada beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan, termasuk Sukiman. Saat kasus dugaan suap Yaya Purnomo, Amin Santono, dan Eka Kamaludin masih di tahap penyidikan memang penyidik telah menggeledah apartemen Suherlan selaku tenaga ahli Sukiman dan menyita mobil Toyota Camry disertai dokumen-dokumen usulan dana perimbangan daerah.

“Tersangka SKM (Sukiman) yang kami umumkan tadi menjabat sebagai anggota DPR. Sampai saat ini total 70 anggota DPR yang telah diproses dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi,” ujar Febri. Dia menambahkan bahwa kasus korupsi yang terkait dengan kewenangan penganggaran seperti ini sangat disayangkan harus terjadi karena seharusnya anggaran dapat dinikmati masyarakat Indonesia secara maksimal, bukan justru dikorupsi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

• **sabir lalu hu**